

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2014

OUTLINE ANALISIS PROVINSI

1. Perkembangan Indikator Utama
 - 1.1 Pertumbuhan Ekonomi
 - 1.2 Pengurangan Pengangguran
 - 1.3 Pengurangan Kemiskinan
2. Kinerja Pembangunan Kota/ Kabupaten
 - 2.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan kemiskinan
 - 2.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM
 - 2.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran
 - 2.4 Kesenjangan Wilayah
3. Penyebab Permasalahan Pembangunan
 - 3.1 Tingginya Ketergantungan terhadap Sektor Primer (Pertanian)
 - 3.2 Kurangnya Sumber Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
 - 3.3 Rendahnya Kualitas lapangan Kerja
 - 3.4 Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah
 - 3.5 Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia
 - 3.6 Terbatasnya Mobilitas Tabungan Masyarakat
 - 3.7 Rendahnya Kualitas Belanja Daerah
4. Prospek Pembangunan Tahun 2015
5. Penutup
 - 5.1 Isu Strategis Daerah
 - 5.2 Rekomendasi Kebijakan



Desember 2014

SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH

Perkembangan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat 2014

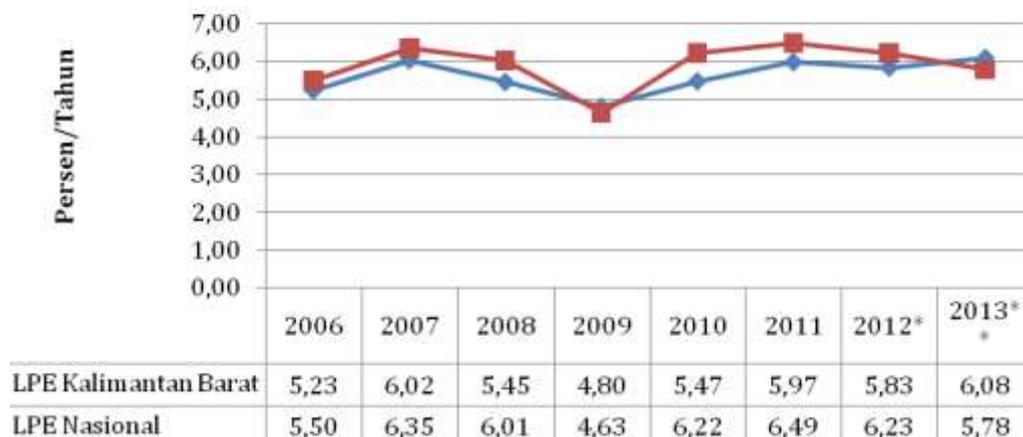
SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH

A. Perkembangan Indikator Utama

1. Pertumbuhan Ekonomi

Provinsi Kalimantan Barat mempunyai peran penting dalam perekonomian nasional terutama sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Provinsi Kalimantan Barat memiliki beberapa komoditas utama yang diunggulkan diantaranya: Padi, Jagung, Lidah Buaya, serta Jeruk. Selama periode 2006-2013 kinerja perekonomian Provinsi Kalimantan Barat relatif cukup baik. Perekonomian daerah tumbuh dengan laju rata-rata 5,61 persen per tahun (Gambar 1) Dari perspektif wilayah, kontribusi PDRB Kalimantan Barat terhadap output wilayah Kalimantan pada tahun 2013 sebesar 11,99 persen dan menyumbang 1,11 persen terhadap pembentukan PDB nasional. Dari sisi besaran, perekonomian Kalimantan Barat menduduki peringkat kedua terbesar di bawah Kalimantan Timur.

Gambar 1
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2000

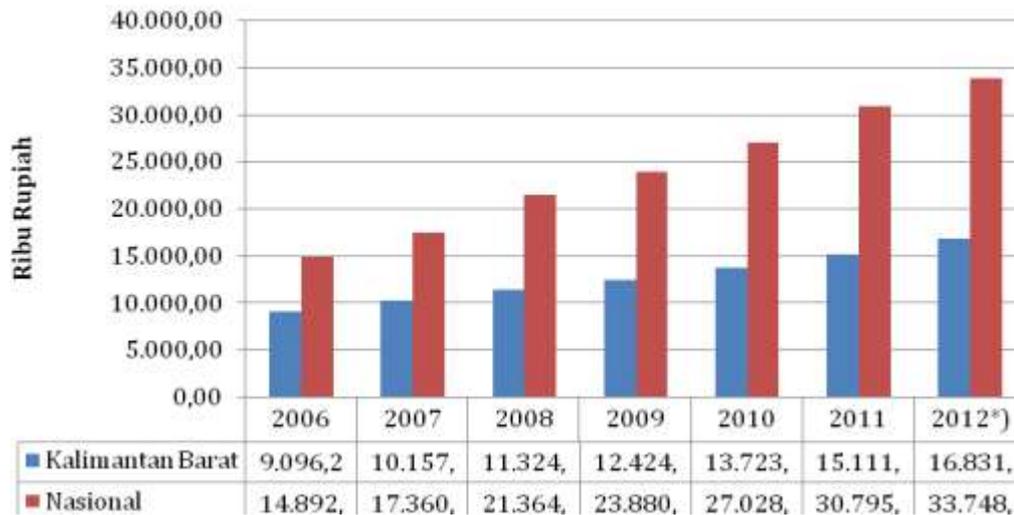


Sumber: BPS, 2013

Dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah yang masih berada dibawah laju pertumbuhan nasional, Provinsi Kalimantan Barat belum mampu menutup kesenjangan pendapatan perkapita dari rata-rata pendapatan perkapita nasional. Rasio PDRB per kapita antara Kalimantan Barat dan nasional menurun dari 61,08 persen pada tahun 2008 menjadi 49,87 persen pada tahun 2012 (Gambar 2). Di tingkat wilayah Kalimantan, PDRB perkapita Kalimantan Barat berada pada posisi terendah. Tantangan yang dihadapi pemerintah daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan

landasan ekonomi daerah yang memperluas kesempatan kerja dan mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Gambar 2
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku

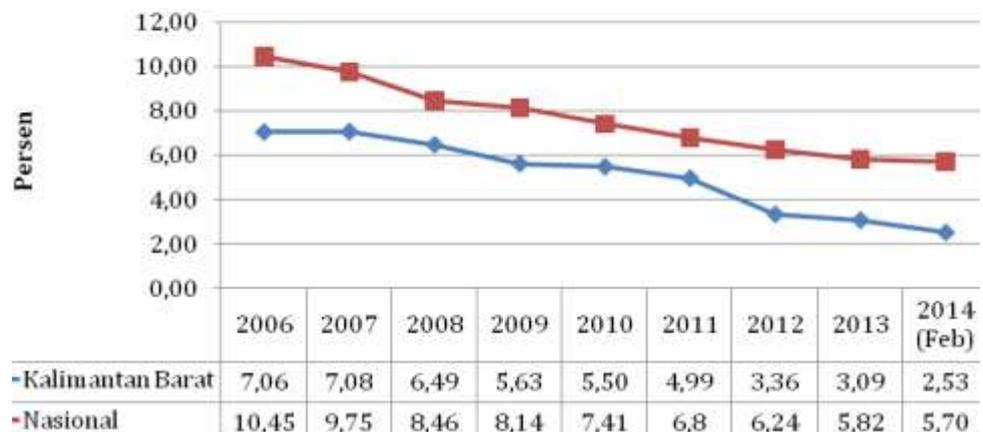


Sumber: BPS, 2013

2. Pengurangan Pengangguran

Dari segi kualitas, pertumbuhan ekonomi yang positif selama enam tahun terakhir belum berhasil menekan tingkat pengangguran secara berarti. Tingkat pengangguran terbuka Kalimantan Barat selama tahun 2006-2013 berkurang sebesar 3,97 persen (Gambar 3).

Gambar 3
Tingkat Pengangguran Terbuka



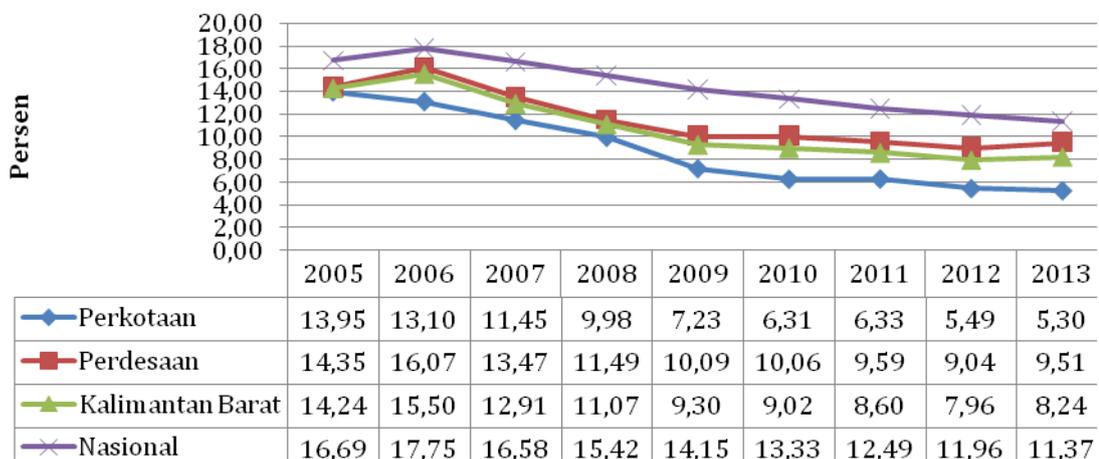
Sumber: BPS, 2014

Pada tahun 2006 meskipun terdapat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang hampir mempengaruhi sebagian provinsi di Indonesia namun tidak mempengaruhi tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor ekonomi di Kalimantan Barat cukup stabil terhadap gejolak harga BBM. Perbandingan secara nasional menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Kalimantan Barat tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja dan nilai tambah yang diciptakan perekonomian daerah cukup optimal. Tantangan yang harus diatasi adalah peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan yang menyerap tenaga kerja realtif tinggi.

3. Pengurangan Kemiskinan

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan penurunan pengangguran, tingkat kemiskinan daerah juga berhasil ditekan. Selama periode 2006-2013, persentase penduduk miskin menurun dari 15,50 persen menjadi 8,24 persen (Gambar 4). Namun demikian pada tahun 2006, persentase penduduk miskin di perkotaan cukup meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini mengindikasikan bahwa fenomena kenaikan harga BBM yang terjadi di tahun tersebut mempengaruhi daya beli masyarakat perkotaan. Meskipun tingkat kemiskinan dapat diturunkan secara bertahap, namun demikian untuk kemiskinan di perdesaan perlu ditekan secara signifikan dikarenakan penurunannya yang relatif lebih lambat apabila dibandingkan dengan perkotaan. Hal ini mengindikasikan terjadinya stagnasi pertumbuhan sektor pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya di perdesaan.

Gambar 4
Persentase Penduduk Miskin



Sumber: BPS, 2014

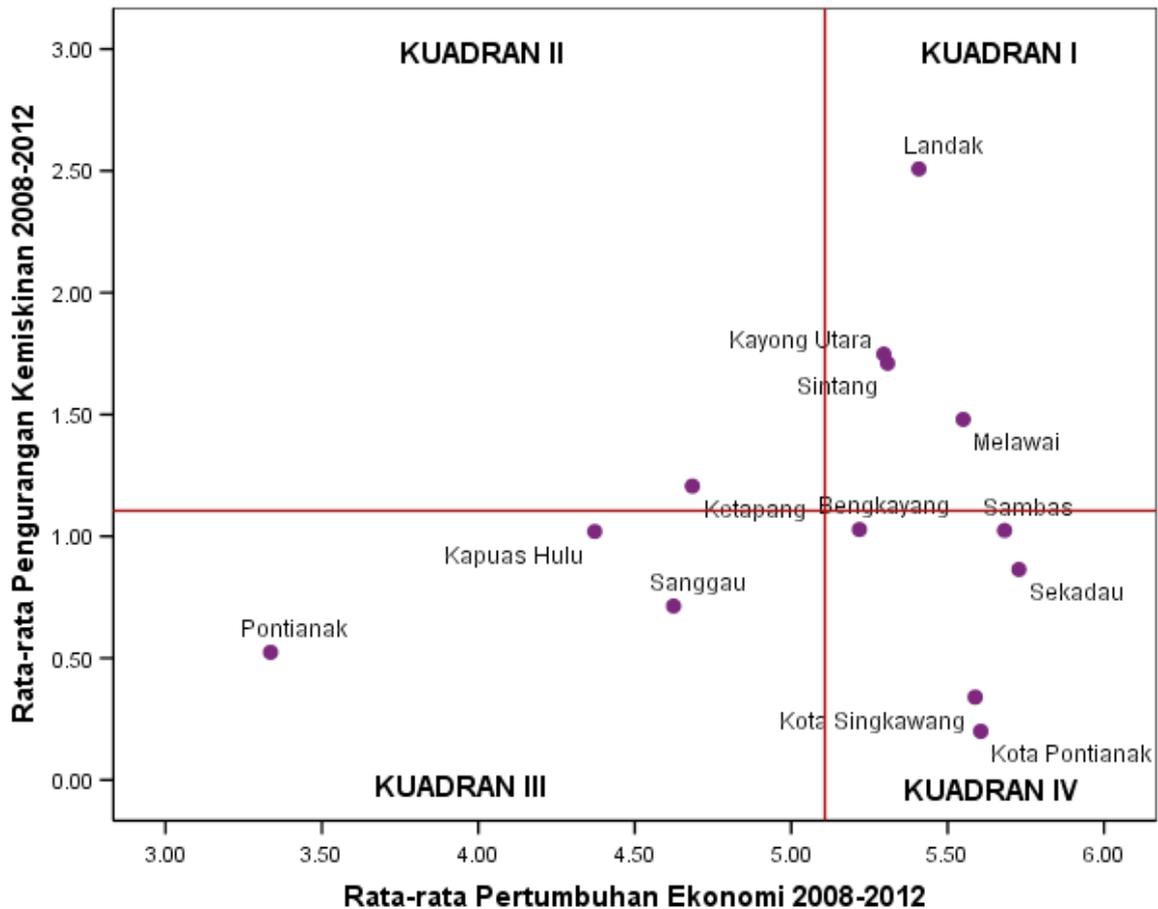
B. Kinerja Pembangunan Kabupaten/ Kota

Kualitas pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh pengurangan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta perluasan lapangan kerja.

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan

Gambar 5 menunjukkan persebaran kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, dengan penjelasan sebagai berikut..

Gambar 5
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengurangan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2008-2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Pertama, Kabupaten Melawai, Landak, Kayong Utara, dan Sintang termasuk kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di atas rata-rata provinsi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat mendorong pengurangan kemiskinan secara lebih cepat (*pro-growth, pro-poor*). Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap meningkatkan upaya pengurangan kemiskinan.

Kedua, Kabupaten Ketapang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di atas rata-rata (*low growth, pro-poor*). Tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah daerah adalah menjaga efektivitas dan efisiensi kebijakan dan program pengurangan

kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta perdagangan dan jasa.

Ketiga, Kabupaten Kapuas Hulu, Sangau, dan Pontianak terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-poor*). Kinerja pembangunan daerah tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar dari golongan miskin. Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan.

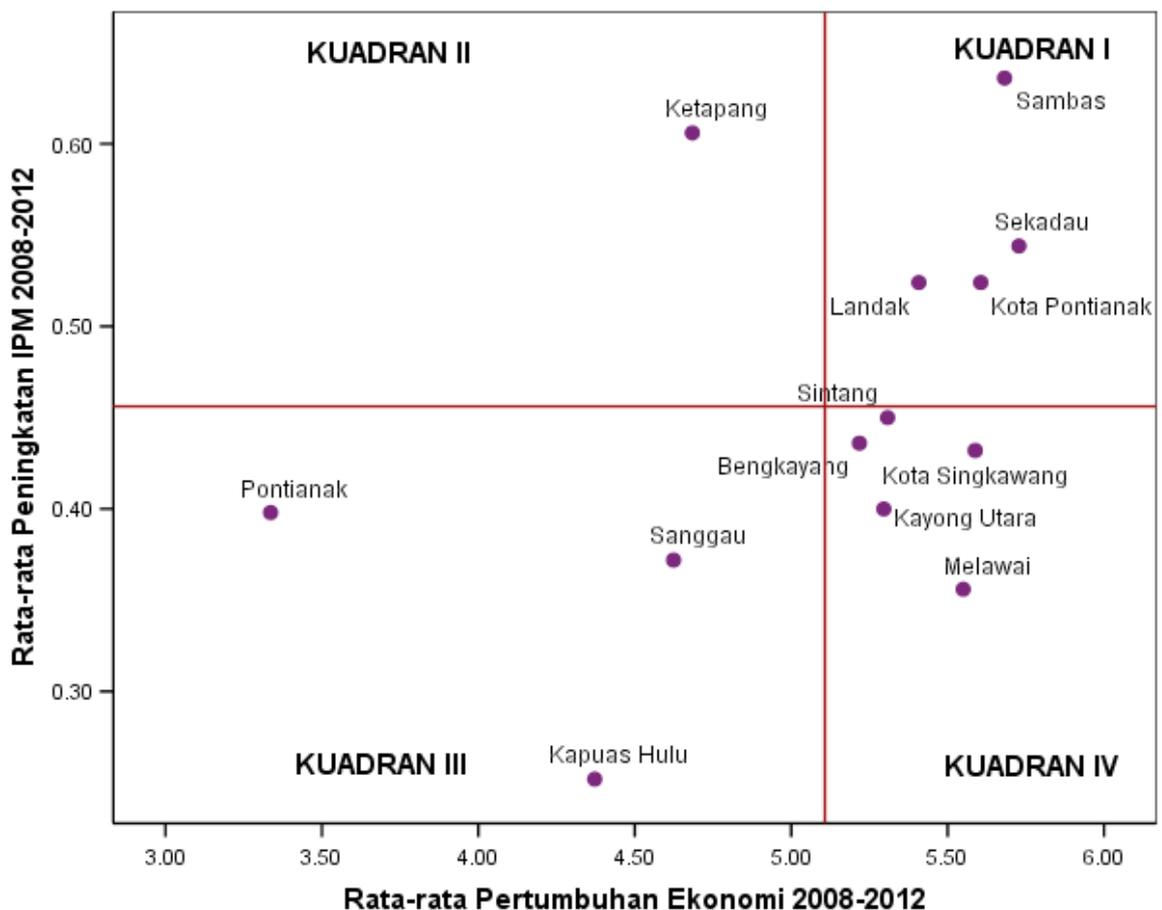
Keempat, Kabupaten Bengkayang, Sekadau, Sambas, Kota Singkawang, dan Kota Pontianak terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro poor*). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah tersebut belum memberi dampak penurunan angka kemiskinan secara nyata. Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan, serta usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Tantangan lainnya adalah meningkatkan koordinasi sinergi dalam mengoptimalkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan

2. Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM

Gambar 6 menunjukkan distribusi kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM selama tahun 2008-2012. *Pertama*, Kabupaten Sambas, Sekadau, Landak, dan Kota Pontianak termasuk daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan IPM (*pro-growth, pro-human development*). Dengan kinerja yang baik ini, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, dan sekaligus mempertahankan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Kedua, Kabupaten Ketapang yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi peningkatan IPM di atas rata-rata (*low growth, pro-human development*). Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik dapat meningkatkan IPM. Tantangan yang harus diatasi adalah mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan ekonomi yang menggunakan sumber daya lokal seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

Gambar 6
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Peningkatan IPM Tahun 2008-2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

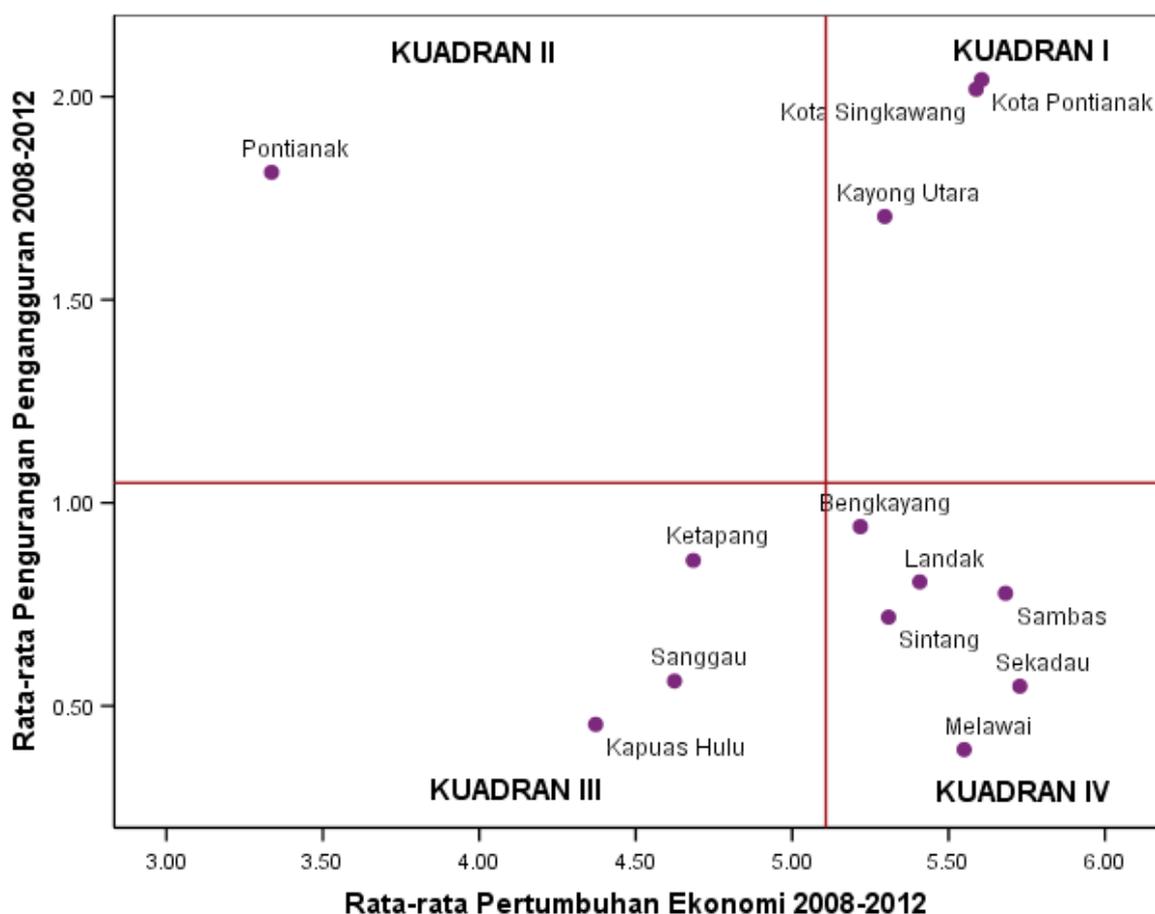
Ketiga, Kabupaten Pontianak, Sanggau, dan Kapuas Hulu terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-human development*). Kondisi ini menegaskan perlunya pemerintah daerah membenahi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus bekerja keras mendorong seluruh SKPD untuk memacu pembangunan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan utama daerah.

Keempat, Kabupaten Sintang, Bengkayang, Kayong Utara, Melawai, dan Kota Singkawang terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi peningkatan IPM di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro human development*). Tantangan bagi pemerintah daerah adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan peningkatan mutu pelayanan publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

3. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran

Gambar 7 menunjukkan persebaran kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran selama tahun 2008-2012.

Gambar 7
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Rata-Rata Pengurangan Jumlah Pengangguran Tahun 2008-2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Pertama, Kabupaten Kayong Utara, Kota Singkawang, dan Kota Pontianak termasuk kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (*pro-growth, pro-job*). Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

Kedua, Kabupaten Pontianak yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di atas rata-rata (*low growth, pro-job*). Hal ini mengindikasikan bahwa perluasan lapangan

kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti pertanian dan perikanan.

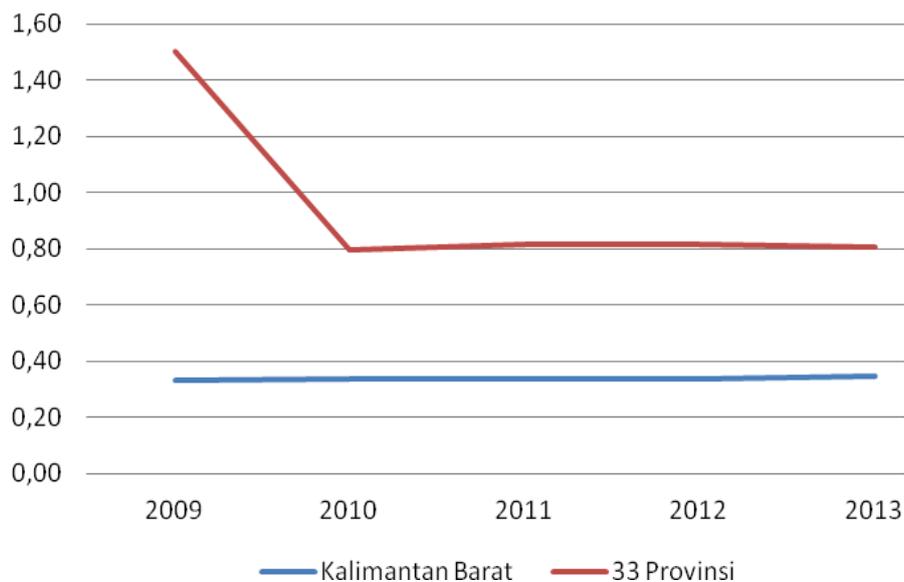
Ketiga, Kabupaten Kapuas Hulu, Ketapang, dan Sangau terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-job*). Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar.

Keempat, Kabupaten Landak, Bengkayang, Sambas, Sintang, Melawai dan Sekadau terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro job*). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut, tetapi tidak dapat menurunkan jumlah pengangguran. Daerah tersebut termasuk daerah perkebunan, dan daerah perkotaan yang harus menampung migrasi penduduk dari daerah perdesaan. Tantangan yang harus dihadapi adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan. Tantangan lainnya adalah mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang mampu menyerap tenaga kerja di sektor informal.

4. Kesenjangan Ekonomi

Tingkat kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang ditunjukkan dengan nilai indeks wiliamson dari tahun 2009 - 2013 cukup tinggi. Kesenjangan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat masih berada di bawah nasional dengan kecenderungan semakin meningkat. Kesenjangan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat dikarenakan masih terbatasnya jangkauan sarana dan prasarana bagi masyarakat.

Gambar 8
Perkembangan Kesenjangan Ekonomi (Indeks Williamson) 2009-2013



Sumber: Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Kondisi di atas menghadapi Kalimantan Barat pada tantangan untuk meningkatkan, pemeratakan, dan memperluas jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial lainnya, serta jangkauan informasi sampai ke seluruh pelosok daerah.

Kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Kalimantan Barat terlihat dari besarnya gap antara kabupaten atau kota dengan PDRB perkapita tertinggi dan PDRB perkapita terendah. Kota Pontianak sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Barat memiliki pendapatan perkapita tertinggi di antara kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Ketersediaan infrastruktur di perkotaan turut mendukung tingginya nilai PDRB per kapita di daerah ini.

Tabel 1
Perkembangan Nilai PDRB Perkapita ADHB dengan Migas Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2007-2012 (000/jiwa)

Kab/Kota	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Sambas	8.497	9.513	10.634	11.861	113.408	14.905
Bengkayang	8.057	9.127	10.067	10.905	112.186	13.533
Landak	6.599	7.453	8.154	8.914	10.060	11.147
Pontianak	10.696	8.137	8.714	9.454	10.452	11.296
Sanggau	9.737	10.696	11.613	12.528	13.854	15.310
Ketapang	10.139	11.654	12.126	13.778	15.760	17.501
Sintang	7.679	8.627	9.608	10.694	11.999	13.449
Kapuas Hulu	7.740	8.845	9.686	10.641	11.734	13.100
Sekadau	4.883	5.441	6.036	6.701	7.469	8.236
Melawi	4.000	4.421	4.841	5.625	6.349	7.072
Kayong Utara	7.074	8.059	8.807	9.867	11.092	12.436
Kubu Raya	-	13.985	15.318	17.506	19.774	22.059
Kota Pontianak	15.433	17.424	20.321	22.570	24.898	27.930
Kota Singkawang	9.876	11.037	12.063	133.462	15.095	16.501
KALBAR	10.158	11.363	12.425	13.723	15.111	16.832

Sumber: BPS, 2013

C. Penyebab Permasalahan Pembangunan

1. Ketergantungan pada Sektor Primer (Pertanian)

Struktur perekonomian Kalimantan Barat tahun 2013 didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan (Tabel 2). Sektor pertanian memegang peran terbesar dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Barat dengan pangsa 23,08 persen. Namun, peran sektor pertanian sebagai pendorong utama pertumbuhan daerah semakin berkurang. Selain pertanian, sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan paling pesat adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Pertumbuhan sektor ini cukup pesat dan perannya semakin penting sebagai pendorong pertumbuhan daerah. Sektor penting lainnya bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat adalah sektor industri pengolahan. Sub sektor yang berkembang di Kalimantan Barat adalah industri pengolahan makanan dan minuman.

Tabel 2
Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha (2013)

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	Pertanian	23,08	24,48
2.	Pertambangan	2,01	1,76
3.	Industri Pengolahan	16,27	15,62
4.	Listrik, Gas, Air Minum	0,45	0,42
5.	Konstruksi	11,48	9,01
6.	Perdagangan, Hotel, Restoran	23,02	21,22
7.	Angkutan, Telekomunikasi	7,36	9,85
8.	Keuangan	4,86	5,69
9.	Jasa-jasa	11,48	11,96
		100,00	100,00

Sumber: BPS, 2013

Perkembangan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat juga dilihat dari perkembangan sektor yang menghasilkan barang yang dapat diperdagangkan (*tradeable sector*). Sektor utama (basis) Provinsi Kalimantan Barat adalah pertanian (Tabel 3).

Tabel 3
Nilai LQ Sektor Perekonomian Kalimantan Barat 2008-2012

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	1,86	1,86	1,90	1,93	1,94
a. Tanaman Bahan Makanan	1,53	1,48	1,53	1,56	1,57
b. Tanaman Perkebunan	4,06	4,28	4,34	4,47	4,53
c. Peternakan	1,62	1,63	1,64	1,65	1,61
d. Kehutanan	1,68	1,65	1,61	1,60	1,61
e. Perikanan	1,02	1,00	1,00	0,97	0,95
2. Pertambangan dan Penggalian	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24
a. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Pertambangan Bukan Migas	0,24	0,25	0,27	0,29	0,28
c. Penggalian	1,04	1,02	0,99	0,96	0,98
3. Industri Pengolahan	0,67	0,66	0,65	0,63	0,62
a. Industri Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1). Pengilangan Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2). Gas Alam Cair (LNG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Industri Bukan Migas	0,74	0,72	0,71	0,68	0,66
4. Listrik, Gas & Air Bersih	0,60	0,55	0,56	0,56	0,55
a. Listrik	0,64	0,61	0,64	0,62	0,61
b. Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Air Bersih	1,32	1,33	1,34	1,33	1,33
5. Konstruksi	1,27	1,28	1,30	1,35	1,38
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	1,22	1,25	1,22	1,19	1,18

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
a. Perdagangan Besar dan Eceran	1,42	1,47	1,42	1,38	1,36
b. Hotel	0,38	0,37	0,38	0,36	0,35
c. Restoran	0,19	0,19	0,20	0,21	0,21
7. Pengangkutan dan Komunikasi	1,03	1,01	0,98	0,99	0,96
a. Pengangkutan	1,73	1,74	1,76	1,76	1,71
1). Angkutan Rel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2). Angkutan Jalan Raya	0,99	1,00	1,03	1,04	1,01
3). Angkutan Laut	1,65	1,69	1,75	1,75	1,75
4). Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	13,32	13,39	13,41	13,70	13,13
5). Angkutan Udara	1,30	1,29	1,22	1,17	1,13
6). Jasa Penunjang Angkutan	1,78	1,81	1,90	1,95	1,91
b. Komunikasi	0,46	0,49	0,49	0,52	0,52
8. Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan	0,58	0,58	0,59	0,59	0,59
a. Bank	0,28	0,29	0,31	0,31	0,31
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	1,82	1,70	1,65	1,61	1,62
c. Jasa Penunjang Keuangan	0,06	0,05	0,05	0,05	0,04
d. Real Estat	0,98	0,98	1,00	1,01	1,02
e. Jasa Perusahaan	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
9. Jasa-jasa	1,23	1,22	1,23	1,23	1,27
a. Pemerintahan Umum	2,61	2,63	2,68	2,73	2,90
b. Swasta	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15
1). Jasa Sosial Kemasyarakatan	0,20	0,19	0,19	0,18	0,19
2). Jasa Hiburan dan Rekreasi	0,27	0,27	0,27	0,26	0,25
3). Jasa Perorangan dan Rumah tangga	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

Nilai LQ dihitung menggunakan PDRB ADHK Tahun 2000

Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Nilai *location quotient* subsektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa *share* subsektor tersebut untuk Provinsi Kalimantan Barat secara proporsional lebih tinggi dari nasional. Dengan kata lain, Provinsi Kalimantan Barat memiliki keunggulan komparatif pada sektor-sektor tersebut dibanding daerah-daerah lain. Kecenderungan menarik adalah semakin menguatnya nilai LQ pada industri makanan dan minuman yang mengindikasikan peluang dan potensi Provinsi Kalimantan Barat untuk mengembangkan industri makanan dan minuman. Oleh sebab itu, Provinsi Kalimantan Barat perlu mengembangkan subsektor-subsektor industri pengolahan lain khususnya yang memiliki kaitan kuat dengan komoditas unggulan daerah.

Pertumbuhan sektor industri pengolahan memiliki arti yang sangat strategis bagi perekonomian daerah dalam dua hal. Pertama, permintaan terhadap produk manufaktur relatif lebih elastis terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dibanding permintaan terhadap komoditas pertanian primer. Kecenderungan meningkatnya pendapatan masyarakat dan bertambahnya proporsi kelas menengah diperkirakan akan disertai

dengan meningkatnya permintaan barang-barang konsumsi yang dihasilkan dari sektor industri. Kedua, sektor industri pengolahan memiliki kelebihan dibanding sektor-sektor lain dalam penciptaan nilai tambah, dan dampak berganda bagi pengembangan sektor-sektor lain melalui kaitan ke depan (sektor pengguna) dan ke belakang (sektor penyedia input), serta penciptaan lapangan kerja. Selama periode 2010-2014 sektor pertambangan dan perdagangan dan jasa-jasa mampu menciptakan lapangan kerja secara signifikan pada perekonomian (Tabel 4).

Tabel 4
Perubahan Jumlah Orang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan 2010-2014

No.	Lapangan Pekerjaan	2010	2014 (Feb)	Perubahan
1	Pertanian	1.353.867	1.320.611	-33.256
2	Pertambangan	44.743	96.706	51.963
3	Industri Pengolahan	78.108	73.192	-4.916
4	Listrik, Gas, Air	1.246	6.008	4.762
5	Bangunan	97.545	107.597	10.052
6	Perdagangan, Hotel, Restoran	271.574	341.270	69.696
7	Angkutan & Telekomunikasi	74.111	44.285	-29.826
8	Keuangan	16.738	27.206	10.468
9	Jasa-Jasa	214.315	292.436	78.121
Total		2.152.247	2.309.311	157.064

Sumber: BPS, 2014

2. Kurangnya Sumber Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Dari sisi pengeluaran (penggunaan) pendorong utama pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat adalah konsumsi rumah tangga (Tabel 5). Pada tahun 2009, ekspor mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) cukup tajam. Hal ini tampaknya terkait dengan krisis ekonomi dunia yang diiringi pelemahan permintaan komoditas ekspor dari negara-negara maju. Pada tahun-tahun sebelumnya peranan ekspor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sangat tinggi dan dominan.

Tabel 5
PDRB Menurut Penggunaan 2013

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	Konsumsi Rumah Tangga	51,49	52,94
2.	Konsumsi Lembaga Nirlaba	0,90	0,95
3.	Konsumsi Pemerintah	17,43	12,62
4.	PMTB	26,51	27,43
5.	Perubahan Stok	1,02	2,83
6.	Ekspor	24,52	30,33
7.	Impor	21,87	27,10
Total		100,00	100,00

Sumber : BPS, 2013

Dengan menyusutnya volume ekspor, pertumbuhan daerah pada tahun 2009 ditopang oleh konsumsi masyarakat. Ada dua hal yang bisa dipetik sebagai pelajaran. Pertama, pertumbuhan yang terlalu bertumpu pada ekspor sangat rentan terhadap gejolak ekonomi dunia. Kontraksi sektor-sektor yang berorientasi ekspor berpotensi diikuti pengurangan tenaga kerja yang dapat berakibat pada meningkatnya pengangguran di daerah. Kedua, pertumbuhan yang terlalu bertumpu pada konsumsi masyarakat memiliki batas dan tidak berkelanjutan. Dalam jangka menengah kondisi ini akan mengurangi potensi tabungan masyarakat. Padahal tabungan sangat penting bagi perekonomian karena dapat menjadi sumber investasi sektor produktif melalui intermediasi perbankan. Oleh karena itu, tantangan yang harus diatasi adalah mendorong terciptanya keseimbangan sumber-sumber pertumbuhan khususnya dengan meningkatkan peran investasi (pembentukan modal tetap bruto) dalam perekonomian daerah.

Mengingat pentingnya investasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah, hal yang perlu ditingkatkan adalah iklim usaha di daerah. Iklim usaha yang kondusif bagi investasi terbentuk dari kualitas regulasi yang konsisten, perpajakan yang transparan dan tidak tumpang tindih, pelayanan perijinan yang efisien, dan kelembagaan penyelesaian konflik yang efektif. Langkah penting dalam perbaikan pelayanan perijinan adalah pelaksanaan dan penerapan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara sungguh-sungguh dan konsisten. Dalam hal ini, semua kabupaten/kota di Kalimantan Barat secara formal telah memiliki badan/kantor yang menyelenggarakan PTSP. Ukuran keberhasilan pelaksanaan PTSP tersebut adalah peningkatan efisiensi perijinan yang harus tercermin dari menurunnya biaya dan waktu yang diperlukan oleh para pelaku usaha.

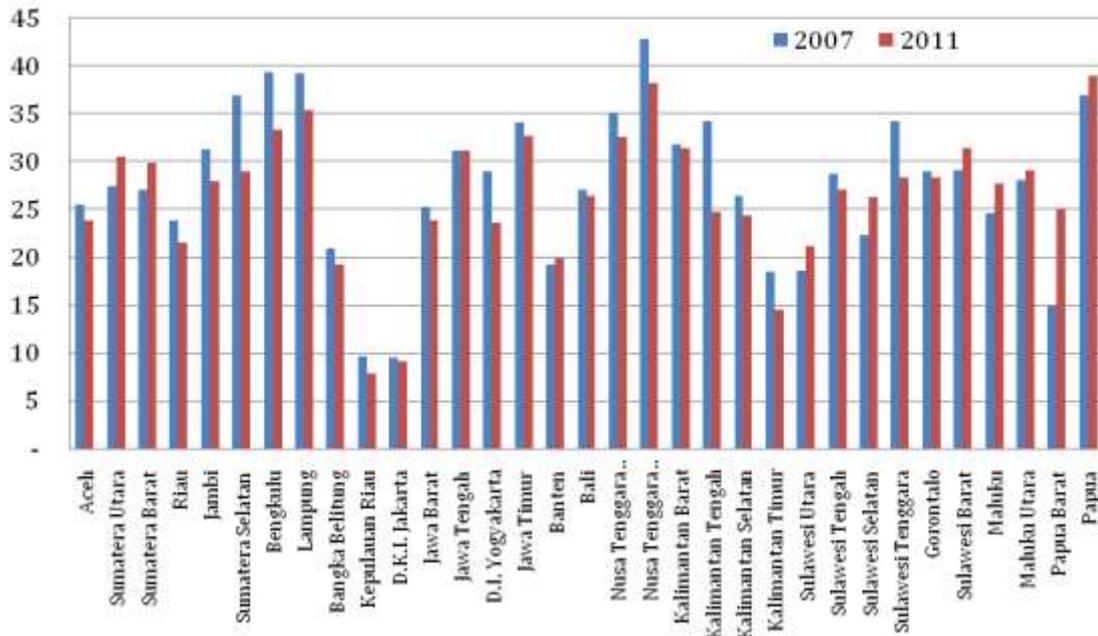
3. Rendahnya Kualitas Lapangan Kerja

Salah satu penyebab dari rendahnya PDRB/kapita dan masih tingginya kemiskinan daerah adalah rendahnya kualitas lapangan kerja yang tersedia. Kondisi ini dapat diamati dari tingginya persentase pekerja dengan status pekerjaan kurang berkualitas, yakni pekerja bebas pertanian, pekerja bebas non pertanian, dan pekerja tak dibayar. Para pekerja di kelompok ini sangat rentan untuk terjerumus dalam lingkaran kemiskinan karena sifat pekerjaan yang tidak pasti dan umumnya mendapatkan upah yang sangat rendah. Dengan kata lain, tingkat pengangguran terbuka yang rendah di Kalimantan Barat adalah karena masyarakat bersedia bekerja apa saja untuk mempertahankan hidup. Pada tahun 2011, persentase pekerjaan kurang berkualitas di Kalimantan Barat sedikit menurun dari setahun sebelumnya, tetapi angkanya masih cukup tinggi di Wilayah Kalimantan (Gambar 9).

Di samping itu, penurunan tingkat pengangguran juga melambat sejak tahun 2008. Hal ini mungkin berkaitan dengan melemahnya permintaan atas komoditas ekspor akibat krisis ekonomi dunia. Melemahnya permintaan di pasar dunia di samping menurunkan volume ekspor juga biasanya diikuti oleh turunnya harga komoditas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kalimantan Barat belum berhasil mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan posisi geografis yang strategis untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Oleh sebab itu, pemerintah daerah tidak boleh berpuas diri dengan indikator pengangguran yang rendah. Tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah daerah adalah perlunya mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian yang dapat menciptakan

lapangan kerja alternatif dan lebih berkualitas serta memberikan nilai tambah dan pendapatan yang lebih besar.

Gambar 9
Persentase Pekerjaan Kurang Berkualitas



Sumber: BPS, 2012

4. Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah

Optimalisasi posisi Kalimantan Barat yang sangat strategis bagi pengembangan wilayah Kalimantan mutlak membutuhkan dukungan prasarana perhubungan yang baik khususnya memperlancar lalu lintas penduduk dan distribusi barang. Salah satu prasarana utama adalah jalan. Kalimantan Barat dilayani oleh jaringan jalan sepanjang 14.738 km. Ketersediaan jaringan jalan di Kalimantan Barat masih sangat rendah apabila diukur dari kerapatan jalan (panjang jalan per kilometer persegi). Kondisi prasarana jalan di Kalimantan Barat dibanding provinsi lain cukup tertinggal dan masih berada di bawah kerapatan jalan nasional.

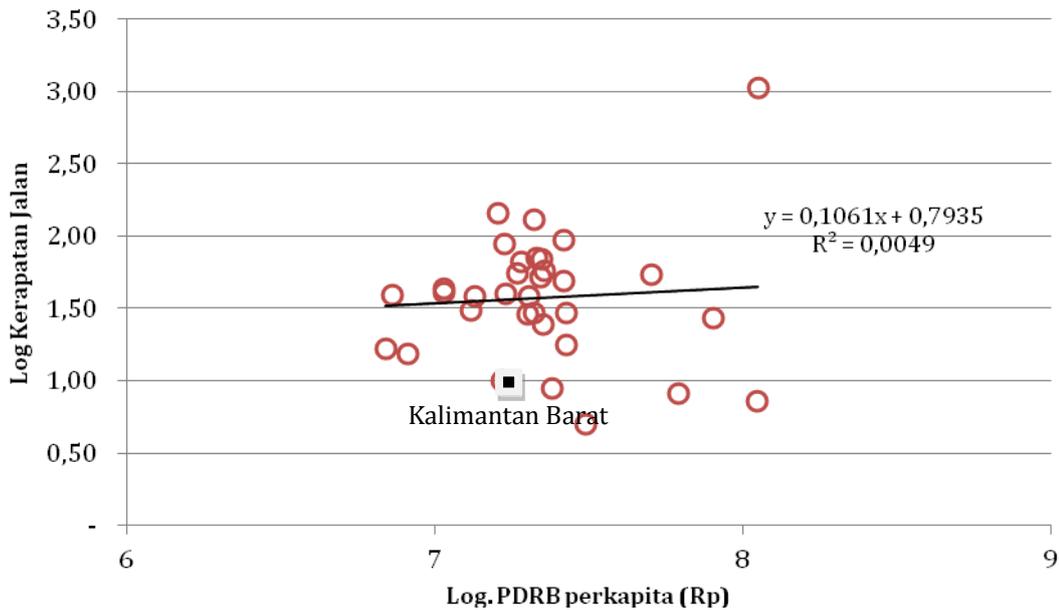
Berdasarkan asumsi terdapat korelasi antara tingkat kerapatan jalan dan tingkat pendapatan perkapita dalam suatu perekonomian, dengan menggunakan data 33 provinsi terlihat hubungan positif antara PDRB per kapita dan tingkat kerapatan jalan (Gambar 10). Semakin tinggi pendapatan per kapita wilayah kerapatan jalannya cenderung tinggi pula. Provinsi-provinsi yang posisinya di bawah kurva linier tersebut berarti mengalami defisiensi infrastruktur jalan. Dengan menggunakan ukuran ini terlihat bahwa posisi Kalimantan Barat relatif tidak lebih baik dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Dengan pendapatan perkapita tinggi, posisi Kalimantan Barat mengalami defisiensi infrastruktur jalan.

Tabel 6
Kerapatan Jalan dan PDRB Per Kapita Provinsi Tahun 2012

No	Provinsi	PDRB per kapita (Ribu Rp)	Kerapatan Jalan
1	DKI Jakarta	111.913	1.068,36
2	DIY	16.054	146,56
3	Bali	20.948	130,28
4	Jawa Timur	26.274	95,37
5	Jawa Tengah	16.864	88,75
6	Jawa Barat	21.274	72,08
7	Sulawesi Selatan	22.151	69,68
8	Banten	19.038	66,81
9	Sulawesi Utara	22.624	57,89
10	Lampung	18.460	56,44
11	Kep. Riau	50.174	54,95
12	Sumatera Barat	22.035	52,36
13	Sumatera Utara	26.185	49,50
14	NTB	10.691	43,55
15	Gorontalo	10.703	40,85
16	Sulawesi Barat	17.012	40,62
17	NTT	7.236	39,95
18	Bengkulu	13.522	38,99
19	Aceh	20.164	38,76
20	Sulawesi Tenggara	13.112	30,71
21	Kep. Bangka Belitung	26.784	29,93
22	Sulawesi Tengah	21.052	29,73
23	Kalimantan Selatan	20.051	29,28
24	Riau	79.786	27,25
25	Jambi	22.508	24,81
26	Sumatera Selatan	26.742	17,86
27	Maluku Utara	6.929	16,72
28	Maluku	8.134	15,39
19	Kalimantan Barat	16.421	10,00
30	Kalimantan Tengah	23.987	8,96
31	Papua Barat	61.462	8,24
32	Kalimantan Timur	111.210	7,22
33	Papua	30.713	5,06
	Indonesia	33.531	25,99

Sumber: BPS (2012), Statistik Kementerian PU (2013)

Gambar 10
Hubungan antara Kerapatan Jalan dan GDP Per Kapita Tahun 2012



Sumber: BPS (2013), Statistik Kementerian PU (2013)-diolah

Secara kualitas, kondisi jalan di Kalimantan Barat relatif baik, ditunjukkan dari panjang jalan yang sudah beraspal di provinsi ini. Permukaan jalan beraspal di Kalimantan Barat sudah mencapai 81 persen (Tabel 7), menunjukkan daya dukung jalan untuk pergerakan barang relatif baik

Tabel 7
Panjang Jalan Nasional Menurut Jenis Permukaan Tahun 2012

PROVINSI	JENIS PERMUKAAN JALAN								Total	
	Aspal		Kerikil		Tanah		Lainnya			
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Kalimantan Barat	1.347	82	177	11	124	7	5	0	1.653	100
Kalimantan	4.660	81	615	11	429	8	23		5.727	100
INDONESIA	42.284	79	5018	9	3504	7	2836	5	53.642	100

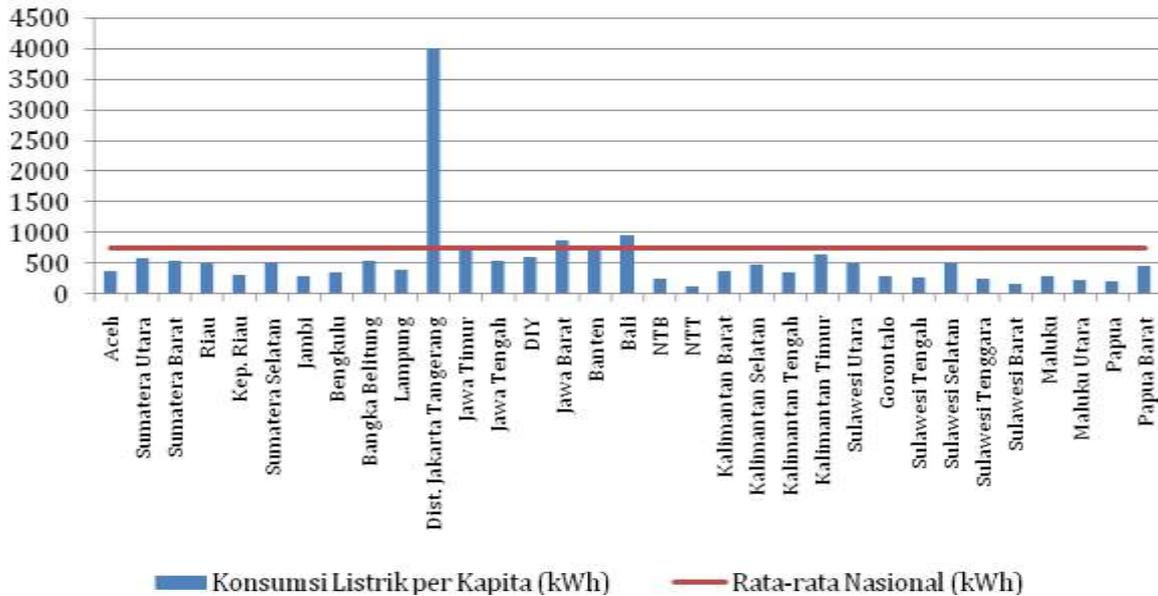
Sumber: BPS, 2012

Tingginya tingkat kerusakan jalan kabupaten ini tentu menjadi penghambat peningkatan produktivitas sektor pertanian dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi bagi pengembangan industri lokal. Tantangan yang harus diatasi adalah peningkatan kualitas jaringan jalan di Provinsi Kalimantan Barat akan meningkatkan volume kendaraan di dalam Wilayah Kalimantan.

Infrastruktur lain yang juga sangat penting bagi perekonomian wilayah adalah kelistrikan. Dengan membandingkan kondisi di 33 provinsi, konsumsi listrik perkapita di Kalimantan Barat masih berada di bawah rata-rata nasional dan merupakan yang terendah kedua di Wilayah Kalimantan setelah Kalimantan Timur (Gambar 11). Untuk mengukur

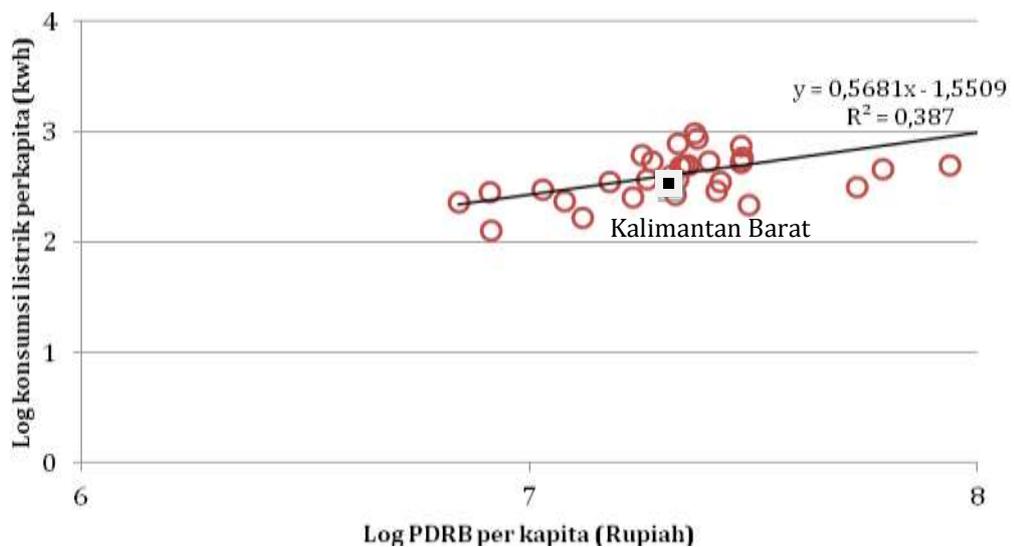
defisiensi terhadap infrastruktur kelistrikan digunakan cara yang sama, yaitu dengan melihat korelasi antara pendapatan perkapita dan konsumsi listrik perkapita. Dengan menggunakan data 33 provinsi, terlihat hubungan yang positif antara PDRB per kapita dengan tingkat konsumsi listrik (Gambar 12). Wilayah yang memiliki posisi di bawah kurva linier mengalami defisiensi infrastruktur listrik. Dengan menggunakan perbandingan internasional, konsumsi listrik di Kalimantan Barat lebih rendah dibanding provinsi lain

Gambar 11
Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) Tahun 2013



Sumber: Statistik PLN, 2013

Gambar 12
Hubungan Konsumsi Listrik dan Pendapatan Tahun 2013

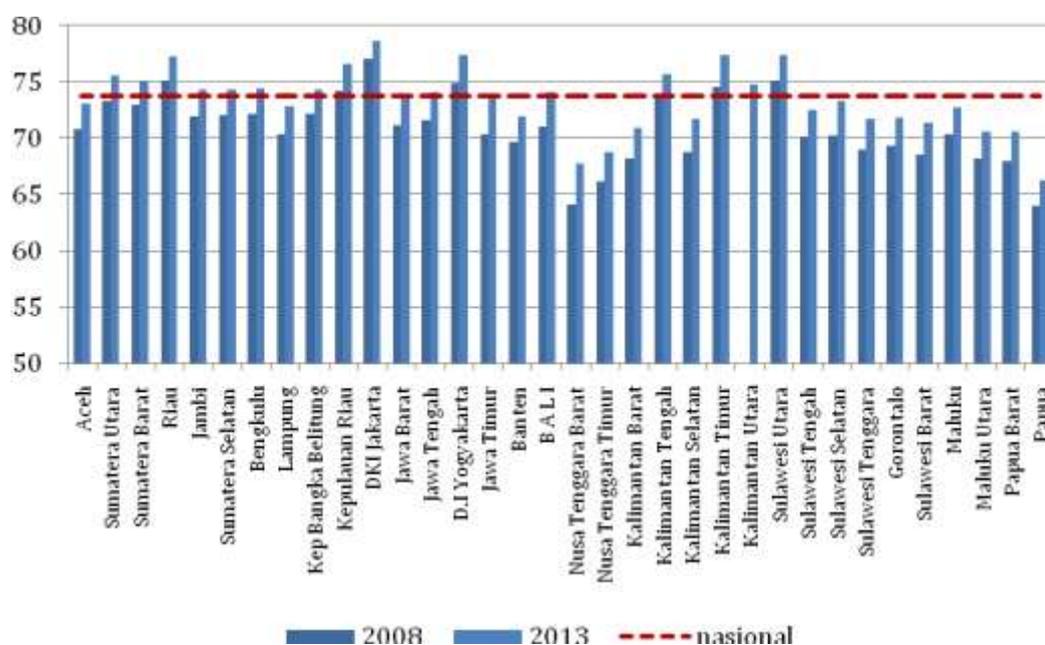


Sumber: BPS (2013), Statistik PLN (2013) - diolah

5. Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan dan perluasan pembangunan ekonomi daerah. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, semakin produktif angkatan kerja, dan semakin tinggi peluang melahirkan inovasi yang menjadi kunci pertumbuhan secara berkelanjutan. Salah satu faktor yang mungkin menghambat pertumbuhan Kalimantan Barat adalah kualitas sumber daya manusianya yang relatif rendah. Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Barat pada tahun 2013 masih berada di bawah rata-rata nasional dan berada pada peringkat 29 dari 33 provinsi dengan nilai 70,93 (Gambar 13). Pada tahun 2013, rata-rata lama sekolah di Kalimantan Barat adalah 7,17 tahun, meningkat dari tahun 2008 yaitu 6,7 tahun. Indikator melek huruf di Kalimantan barat meningkat dari 89,4 persen pada tahun 2008 menjadi 91,7 persen pada tahun 2013 .

Gambar 13
Nilai IPM Provinsi di Indonesia Tahun 2008 dan 2013



Sumber: BPS, 2013

Tabel 8
Angkatan Kerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan

No.	Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan	2008	2014	Perubahan
1	≤ SD	1.323.128	1.368.700	45.572
2	SMTp	370.306	371.305	999
3	SMTA Umum	372.369	452.736	80.367
5	Diploma I/II/III/Akademi	50.554	72.822	22.268
6	Universitas	41.192	103.632	62.440
	Total	2.157.549	2.369.195	211.646

Sumber: BPS, 2014

Apabila dilihat dari struktur angkatan kerja berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, proporsi angkatan kerja dengan ijazah minimal SMA meningkat dari tahun 2008 ke tahun 2014 (Tabel 8). Perbaikan struktur angkatan kerja ini perlu terus didorong untuk mendukung transformasi ekonomi daerah berbasis agroindustri.

6. Terbatasnya Mobilitas Tabungan Masyarakat

Tabungan masyarakat yang dihimpun bank umum dan BPR di Provinsi Kalimantan Barat lebih rendah dibanding pinjaman yang dikucurkan. Kondisi ini mengindikasikan terbatasnya dana perbankan di daerah yang bisa dikonversi menjadi investasi bagi kegiatan produktif. Rasio pinjaman terhadap simpanan di Bank Umum dan BPR tahun 2013 sebesar 1,16 (Tabel 9). Hal ini berarti bahwa kegiatan investasi di Provinsi Kalimantan Barat ditentukan oleh suntikan dana dari luar. Dengan kata lain, pembangunan di Kalimantan Barat dibiayai oleh tabungan masyarakat luar daerah.

Tabel 9
Rasio Simpanan dan Pinjaman di Bank Umum dan BPR Tahun 2013

Wilayah	Posisi Simpanan di Bank Umum dan BPR (Milyar Rp)	Posisi Pinjaman di bank Umum dan BPR (Milyar Rp)	Rasio Pinjaman terhadap Simpanan	Rasio PMTB terhadap Simpanan
Kalimantan Barat	36.937	42.687	1,16	0,61
Kalimantan	173,718	217.741	1,25	0,80
Nasional	3.575.891	3.322.683	0,92	0,47

Sumber: BPS, 2013

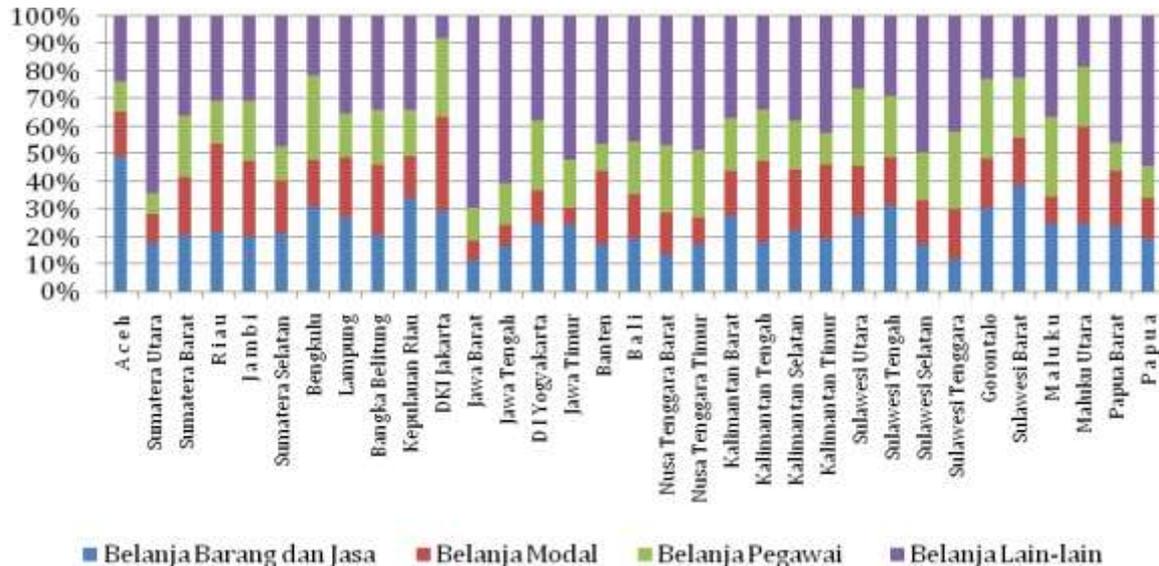
Dalam jangka panjang terbatasnya sumber dana pinjaman ini akan berisiko meningkatkan harga modal (*cost of fund*) di daerah. Dengan kondisi tiinginya permintaan kredit, bank-bank umum mungkin menerapkan tingkat bunga kredit yang sama antar daerah, namun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan lembaga-lembaga keuangan non bank lainnya tentu akan meningkatkan imbal hasil (bunga) pinjaman. Kenaikan bunga pinjaman akan memberatkan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Tantangan yang harus diatasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah mengembangkan kerjasama dengan perbankan dalam penjaminan kredit dan mobilisasi tabungan masyarakat.

7. Rendahnya Kualitas Belanja Daerah

Berdasarkan data total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota pada tahun 2014, porsi belanja modal dalam total belanja APBD di Kalimantan Barat sebesar 16,35 persen, sementara porsi belanja pegawai, meliputi belanja pegawai dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung, mencapai besarnya 18,72 persen. Ke depan perlu didorong perbaikan komposisi belanja pemerintah daerah ini yang lebih mengarah pada belanja modal. Belanja modal memiliki dampak langsung yang relatif besar kepada perekonomian. Meskipun secara umum porsi investasi pemerintah lebih kecil dibandingkan investasi swasta, namun perannya tidak tergantikan dalam suatu perekonomian. Pembangunan prasarana publik seperti jalan, saluran irigasi, dan jaringan

listrik mutlak memerlukan peran pemerintah. Peran investasi pemerintah ini dirasa semakin penting di daerah-daerah yang level investasi swastanya relatif rendah. Investasi pemerintah dalam konteks ini adalah sebagai perintis dan pembuka jalan bagi masuknya investasi swasta.

Gambar 14
Komposisi Belanja Pemerintah Daerah 2013



Sumber: BPS, 2013

D. Prospek Pembangunan Tahun 2015

Daerah dengan tingkat pendapatan perkapita relatif rendah pada umumnya akan memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena investasi akan memberikan tambahan output (*marginal product of capital*) yang lebih tinggi. Demikian juga halnya dengan Provinsi Kalimantan Barat, prospek pertumbuhan daerah di tahun 2015 akan ditentukan oleh seberapa besar realisasi investasi di daerah. Dalam konteks ini Provinsi Kalimantan Barat memiliki dua modal berharga.

Pertama, struktur angkatan kerja mengalami pergeseran yang kondusif bagi industrialisasi. Secara relatif angkatan kerja masih didominasi lulusan setingkat SMP ke bawah, namun secara konsisten porsi lulusan SMA ke atas meningkat. Hal ini penting mengingat salah satu faktor yang mendorong pengembangan industri adalah tersedianya *pool* angkatan kerja dengan ketrampilan dan spesialisasi yang cukup dalam jumlah yang banyak.

Kedua, beberapa komoditas unggulan Kalimantan Barat memiliki tingkat diferensiasi yang tinggi seperti lidah buaya dan jeruk. Komoditas ini memiliki keterkaitan yang tinggi dengan citra daerah yang bersifat unik dan khas sehingga relatif sulit untuk ditiru atau diproduksi oleh daerah lain. Dengan keunggulan tersebut, Provinsi Kalimantan Barat dapat mengembangkan produk-produk tersebut sebagai ikon dan penggerak perekonomian daerah yang didukung dengan pengemasan secara baik sesuai standar internasional.

Berdasarkan kinerja pembangunan selama ini dan modal pembangunan yang dimiliki, prospek pembangunan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015 dalam mendukung pencapaian target utama RPJMN 2015-2019 sebagai berikut:

1. Sasaran pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 5,9 – 7,9 persen dapat tercapai. Di Kawasan Timur Indonesia kinerja ekonomi akan semakin membaik berkat meningkatnya produksi pertanian dan aktivitas pertambangan setelah diberlakukannya ijin ekspor mineral bagi para penambang besar. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat telah meningkat pada akhir 2014 melebihi perkiraan sebelumnya. Kalimantan Barat memiliki sumber daya alam melimpah yang berpotensi untuk terus meningkatkan PDRB di wilayah ini.
2. Sasaran pengurangan tingkat kemiskinan dalam Buku III RPJMN 2015-2019 adalah 8,7 – 6,1 persen, sedangkan pada tahun 2013 tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 8,24 persen, untuk itu diperlukan upaya konsisten untuk menurunkan tingkat kemiskinan di provinsi ini. Selama kurun waktu 2014-2019 Provinsi Kalimantan Barat harus menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 2,14 poin persentase atau 0,36 poin persentase per tahun
3. Prospek pencapaian sasaran-sasaran utama pembangunan Provinsi Kalimantan Barat akan sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan baik internal daerah Kalimantan Barat maupun lingkungan eksternal. Dampak krisis di Eropa dan pelambatan arus perdagangan global merupakan ancaman eksternal yang bisa mengganggu kinerja perekonomian daerah melalui transmisi berkurangnya perdagangan komoditas unggulan ekspor.

E. Penutup

1. Isu Strategis Daerah

Dari hasil analisis dan informasi yang tersedia, dan memperhatikan kriteria isu strategis: (i) berdampak besar bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional; (ii) merupakan akar permasalahan pembangunan di daerah; dan (iii) mengakibatkan dampak buruk berantai pada pencapaian sasaran pembangunan yang lain jika tidak segera diperbaiki, maka isu-isu strategis Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan produktivitas sektor pertanian
- b. Industrialisasi dan pengembangan lapangan kerja berkualitas
- c. Peningkatan investasi di daerah
- d. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan suplai kelistrikan
- e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
- f. Mobilisasi tabungan masyarakat dan fungsi intermediasi perbankan untuk mendorong akses permodalan usaha
- g. Peningkatan kualitas belanja modal pemerintah daerah

2. Rekomendasi Kebijakan

Penanganan isu-isu startegis daerah diperkirakan akan dapat meningkatkan kinerja perekonomian daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan yang perlu ditempuh dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekoomi Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam hal akses permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna;
- b. Pemberdayaan petani dan nelayan khususnya dalam hal perbaikan akses faktor produksi (pupuk, benih, pestisida) termasuk peningkatan jaringan irigasi, penyuluhan dan promosi *brand/citra* komoditas unggulan daerah;
- c. Peningkatan kemudahan perijinan usaha;
- d. Perbaikan kualitas jaringan jalan;
- e. Peningkatan kapasitas/suplai listrik wilayah;
- f. Peningkatan akses pendidikan khususnya pendidikan menengah (umum dan kejuruan);
- g. Peningkatan porsi belanja modal APBD yang diprioritaskan pada sektor infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah;
- h. Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan otoritas moneter di tingkat wilayah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif: peningkatan fungsi intermediasi perbankan di daerah, penjaminan kredit dan pengendalian inflasi daerah.